

**PERANAN ALOKASI DANA APBD TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM DI ERA OTONOMI DAERAH : STUDI
TENTANG PENYERAPAN APBD KOTA TEBING TINGGI**

Ishak Trianda
Dosen STMT Malahayati

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah Kota Tebing Tinggi di era otonomi daerah berdampak positif atau tidak kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada umat Islam Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reasearch) dan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Estimasi terhadap penelitian dilakukan dengan melakukan tehnik pembedahan dan penelaahan terhadap konsep APBD Kota Tebing Tinggi di Era Otonomi Daerah khususnya mulai dari tahun 2005 – 2009 beserta Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Buku Kebijakan Umum (KUA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2005 – 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dimasa otonomi daerah sangat positif dan menyentuh kepada masyarakat banyak. Dan khusus Kota Tebing Tinggi ternyata alokasi dana yang dikucurkan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi berdampak meningkatkan kesejahteraan kepada umat Islam di Kota Tebing Tinggi.
Kata Kunci : Dana APBD, Otonomi Daerah, Peluang Kesejahteraan

THE ROLE OF APBD FUND ALLOCATION FOR MUSLIMS PROSPERITY
ENHANCEMENT IN AUTONOMY TERRITORY ERA : A STUDY OF APBD
ABSORPTION OF TEBING TINGGI

Ishak Trianda

Dosen STMT Malahayati

The research aim to analyze the fiscal decentralization taken by the government in autonomy territory era, which it generally give the positive or negative impact for society and specially of Muslim in Tebing Tinggi City of North Sumatera Province.

This Research is library and field research which used primary and secondary data which obtained from Tebing Tinggi government. Approximate estimation of research used analysis technique on the concept of Tebing Tinggi APBD in autonomy territory era, especially during 2005 – 2009, LKPD document, book of KUA (Fund General Policy), RKPD (The work Platform of building territory) of Tebing Tinggi during 2005 – 2009.

The research found that government fiscal policy in autonomy territory era give a positive impact and felt allocation positively affect Muslim prosperity in Tebing Tinggi City.

Key Word : APBD Fund, Autonomy, Prosperity

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang dilakukan masyarakat Indonesia pada tahun 1998 yang lalu di negara kita telah berdampak ke beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek pemerintahan yang merubah pola hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Untuk itu sejak Januari 2001 Negara Indonesia memulai pelaksanaan otonomi daerah di seluruh kota dan kabupaten (Dati II) yang jumlahnya hampir 400 dengan daerah pemekaran otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Salah satu permasalahan keuangan yang ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, dimana mempunyai peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa otonomi daerah. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa memperluas basis ekonomi di berbagai sector, memperluas lapangan usaha, menurunkan tingkat pengangguran dan dapat menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang dikehendaki.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana alokasi dana APBD terhadap kebutuhan ummat Islam dalam penyusunan APBD di era Otonomi Daerah.
2. Bagaimana daya serap APBD dalam upaya peningkatan kesejahteraan ummat Islam kota Tebing Tinggi di era Otonomi Daerah.

1.3 . Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan alokasi dana APBD terhadap kebutuhan ummat Islam dalam penyusunan APBD di era Otonomi Daerah untuk kota Tebing Tinggi
2. Untuk mendeskripsikan daya serap dalam pengaplikasian dana APBD dan dampaknya terhadap kesejahteraan ummat Islam di kota Tebing Tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sejarah

Untuk meningkatkan keberhasilan system pemerintahan daerah setelah reformasi tahun 1998 yang baru ini disebut juga aturan tentang “Otonomi Daerah” pemerintah melakukan perubahan yang besar pula dalam hubungan keuangan Pusat – Daerah yang di atur dalam UU No. 25 tahun 1999.

Sementara dimasa orde baru dahulu seperti yang pernah disampaikan Prof. Mubyarto, sangat prihatin dengan pembangunan diluar Jawa, seperti Riau misalnya penyumbang 65 % dari minyak Indonesia tetapi Propinsi tersebut adalah termiskin kedua di Sumatera, itulah Indonesia, Rakyatnya tidak menikmati tetesan kebawah karena diambil pemerintah Pusat yang membagikan keseluruh Indonesia, sedangkan daerah asalnya kadang – kadang terlupakan.

Alasan pemerintah pusat tidak memberikan wewenang otonomi daerah sepenuhnya karena khawatir daerah – daerah akan menjadi raja – raja kecil yang akan menguasai sumber – sumber daya alam dan cenderung korup. Karena SDMnya belum siap, dilain pihak pemerintah daerah berpendapat pemerintah pusat adalah raja besar yang harus di runtuhkan karena sudah hampir setengah abad lebih sejak kemerdekaan sudah menguasai hajat hidup orang banyak yang ada didaerah – daerah sekitar NKRI, yang berdampak pada ketertinggalan pembangunan disegala bidang baik materi maupun non materi didaerah.

Berbagai permasalahan diatas sebenarnya masih bisa diperbaiki apabila pemerintah membuka kerannya untuk perlahan – lahan menyingkalakan system dan filosofi ekonomi konvensional yang terpusat – menuju system dan filosofi ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. Apabila kalau kebijakan fiskal, moneter dan lembaga keuangan lainnya yang terkait dengan ekonomi mikro dan makro syariahl lainnya masuk kedalam format APBD kedepannya hal ini bisa mempercepat kesejahteraan penduduk Indonesia yang hampir 90% beragama Islam.

2.2 Masa Perubahan Era Reformasi

Tahun-tahun pertama reformasi sekitar tahun 1999 dan 2000 pemerintah pusat Masi menyusun Undang undang yang terkait tentang Otonomi Daerah dan mekanisme peraturan tentang keuangan pusat dan daerah. Setelah itu barulah berbagai UU dan Permen mulai keluar seperti : UU RI No 22 th 1999 tentang Otonomi Daerah, UU RI no. 3 th 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU RI no.32 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan sejumlah peraturan menteri lainnya untuk mengelola keuangan di era otonomi daerah.

Untuk itulah penulis membuat tulisan ini,dengan menelaah beberapa buku undang – undang yang baru dibuat pemerintah dimasa reformasi, keputusan menteri, buku APBD kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada Undang dimasa Otonomi Daerah serta referensi lainnya, penulis membuat kontribusi pemikiran untuk kemaslahatan umat kedepan dalam hal ini rakyat kota Tebing Tinggi dengan membuat penelitian tentang “ Peranan Alokasi Dana APBD terhadap peningkatan kesejahteraan umat di era otonomi daerah” (Study Tentang Penyerapan APBD Kota Tebing Tinggi

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Tepatnya pada tahun 2010 penulis melakukan penelitian untuk tulisan ini di Kantor Pemerintahan Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Untuk itulah tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam hal ini adalah melalui :

- a) Penelitian perpustakaan (Libiary Research) yang pengecekan sumber sekunder dilakukan melalui buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
- b) Penelitian lapangan (Field Research) yaitu merupakan sumber Primer, pengumpulan data ini dilakukan melalui survey pada Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi seperti : Badan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi (Bapeda), Dinas Perindustrian dan Koperasi (Deperindagkop), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan PMK.

4 ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran alokasi dana APBD Kota Tinggi Tinggi di era otonomi daerah.

Suatu Negara yang baik haruslah mempunyai peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan negaranya, agar pelaksanaannya dalam mengelola keuangan Negara itu menjadi baik, maka dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinia IV pembukaan UUD 1945, maka di bentuklah pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintah Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan Negara.

Setelah bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 maka pemerintah daerah kota Tebing Tinggi termasuk pemerintahan yang cepat mengadopsi berbagai peraturan pemerintah yang digulirkan dari pusat. Sebelum otonomi daerah pola pelayanan dan penggunaan APBD terkesan Top Down, dimana perencanaan anggggarannnya sudah ditentukan semuanya oleh pemerintah dalam hal ini Bapeda.

Namun di era otonomi daerah pola penyusunan APBD lebih mengarah ke sisitem Bottom Up dimana pemerintah menerima masukan dari struktur pemerintah terendah mulai dari RT, RW Kelurahan, Kecamatan ditambah masukan dari masyarakat dan LSM.

Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4.2 . Sistem Penyusunan (APBD)

Didalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing, maka dengan berlakunya kedua undang – undang tersebut akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Begitu juga dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional dan Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan.

Pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

4.3 Visi dan Misi Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan perencanaan serta penyusunan jangka panjang, menengah dan tahunan tersebutlah pemerintah daerah Tebing Tinggi membuat visi dan misinya usaha untuk mengadopsi permasalahan diatas dalam rentang tahun 2006 – 2010 Kota Tebing Tinggi telah membuat konsep tentang visi pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

“ Tebing Tinggi menjadi Kota Jasa yang bertujuan pada kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta memiliki daya saing ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi ummat”

Berdasarkan visi pemerintah diatas disusun pula tentang visi dari pemerintah kota tersebut, dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tata pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana Kota serta penata ruang wilayah kota.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, sehat, beriman dan bertaqwa.
4. Meningkatkan ekonomi daerah yang penekanannya pada ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan visi dan misi Kota Tebing Tinggi tersebut maka dibuat strategi menyusun 5 Agenda pembangunan Kota Tebing Tinggi tahun 2006 – 2010 sebagai berikut :

- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- Meningkatkan prasarana perkotaan dan fasilitas umum serta penataan ruang kota.
- Meningkatkan ekonomi daerah
- Meningkatkan kualitas SDM
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kita dapat melihat catatan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi yang tercantum dalam kebijakan penyusunan APBD Tahun 2006 – 2010 dibuatlah agenda pembangunan sebagai pedoman yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diperoleh dari Pusat baik DAU (Dana Alokasi Umum), maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai berikut :

1. Agenda mewujudkan pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan pemerintah pusat dan pembangunan daerah.
2. Agenda peningkatan prasarana perkotaan dan fasilitas umum serta penataan ruang kota.
3. Agenda meningkatkan pembangunan daerah
4. Agend meningkatkan kualitas SDM
5. Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.4 Perspektif alokasi dana APBD Tebing Tinggi terhadap umat Islam Tebing Tinggi

Untuk kajian perspektif alokasi Dana APBD Tebing Tinggi terhadap umat Islam di Tebing Tinggi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang terjadi setelah bergulirnya reformasi di Indonesia dengan di laksanakan desentralisasi fiskal.

Dengan dilakukannya pelaksanaan desentralisasi fiskal maka perkembangan alokasi transfer kedaerah dari tahun 2001 – 2008 secara nominal terus meningkat, dari 8,1 Triliun (4,8 persen terhadap PDP) pada tahun 2007 dan di perkirakan menjadi Rp. 293,3 Triliun (6,3 persen PDB) pada tahun 2008 atas rata-rata tumbuh 70,2 persen pertahun.

Alokasi transfer ke daerah dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Realisasi APBN Tahun 2001 – 2007

Realisasi APBN								Perk - Real
Transfer	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kedaerah	81,1	88,1	120,3	129,7	150,5	236,2	253,3	293,6

Begitu juga dengan dana perimbangan, dimana dalam kurun waktu 2001-2008 dana perimbangan yang merupakan komponen terbesar dari transfer ke daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp. 81,1 Triliun (4,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2001, menjadi Rp. 244,0 Triliun (6,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 dan di perkirakan mencapai Rp. 279,6 Triliun (6,0 Persen terhadap PDB) pada tahun 2008 atau rata – rata 19,3 persen per tahun.

Data perkembangannya bisa dilihat pada table 2 dibawah ini;

Tabel 2

Tren Dana Perimbangan (DBH, DAU,DAK)

Tahun 2001 – 2008

Realisasi APBN								Perte- Real
Dana	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Perimbangan	81,1	94,7	111,1	122,9	143,2	222,1	244,0	279,6

Dari data diatas dapat kita katakan bahwa setelah diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia ada peningkatan penerimaan dari sumber – sumber yang ada di daerah dari pada tahun – tahun sebelum reformasi, kemudian penerimaan tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam upaya meningkatkan kemajuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Maka untuk melihat kemajuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah / wilayah digunakan suatu indicator yang disebut dengan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), menurut definisi PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang di produksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat jabatan kepemilikan.

Ternyata perkembangan PDRB tersebut mulai tahun 2005 – 2010 memperlihatkan data kenaikan dari tahun ke tahun dapat di lihat dari data perkembangan Indonesia Makro Ekonomi Tebing Tinggi tahun 2005 – 2010 data PDRB tersebut mencakup bidang:

Pertanian, pertambangan dan energy, Industri, listrik dan air minum, bangunan, pendapatan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan persewaan serta jasa – jasa semuanya menjadi pemasukan.

Hal ini jelas berdampak kepada kehidupan bermasyarakat Kota Tebing Tinggi dan berdampak terhadap pertumbuhan kesejahteraan perkapita rakyat Tebing Tinggi dimana berdasarkan statistic daerah jumlah yang miskin hampir 78% dan sedikitnya 22% yang beragama non Islam.

4.5 LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT

Sebelum mengarah kepada data – data tersebut dengan melakukan pengecekan kepada umat Islam di Tebing Tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan total pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2003 – 2009 yang bersumber dari PAD dan dana perimbangan yang mengalami peningkatan sebesar 10,76%, apabila di lihat dari kontribusinya terhadap APBD Kota Tebing Tinggi maka merata per tahun mencapai 78,25% untuk lengkapnya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Perkembangan Total Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Tahun 2003 – 2009

Tahun	Pendapatan (PAD + Perimbangan	Pertumbuhan (%)	Volume APBD (Rp)	Proporsi (%)
2003	132,345,234,446,73	-	170,883,769,266,05	77,45
2004	132,345,234,446,73	12,86	154,770.580,065,76	96,50
2005	151,263,329,563,73	1,28	156,450,609,729,61	96,68
2006	236.430,319,698,45	56,30	236,430,319,716,84	99,99
2007	270,645,846,000,00	14,47	292,630,519,274,00	42,48
2008	296.923,761,000,00	9,70	358,807,268,534,00	82,75
2009	346,251,652,000,00	17,24	402,944,858,823,00	86,45
	Rata-Rata Per tahun	24,29		90,33

Sumber : Realisai Perhitungan APBD Tahun 2003 – 2008

Kemampuan sel supporting dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting, guna mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor kemandirian keuangan merupakan factor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi.

Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD nya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing

Tinggi.selama periode 2003 – 2009 memiliki rerata pertumbuhan pertahun sebesar 12,79 % dengan rerata pertumbuhan pertahun sebesar 12,79 %. Dengan rerata kontribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar 4, 82%. Dan data selengkapnya bisa dilihat pada data di bawah ini.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing

Tinggi Tahun 2003 – 2009

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan Proporsi	Volume APBD	
2003	8.021.782.446,73	-	170.883 . 769.266,05	4,69
2004	9.701. 882.335,76	30,94	154.770. 588.065,76	6,27
2005	9.457. 096. 411,61	(2,52)	156.450.609..729,61	6,04
2006	13.385.945.879,45	41,54	236.430.319.716,84	5,66
2007	12.207.168.000,00	(8,81)	292.630.519.274,00	4,17
2008	13.995.062.500,00	14,65	358.807.268.534,00	3,90
2009	14.729.241.000,00	5,26	402.944.858.823,00	3,02
Rata-rata pertahun		10,01		
4,82Sumber : Realisasi Perhitungan APBD				

Tahun 2003 – 2008

Setelah kita perhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi dengan rerata pertahun kontribusi terhadap APBD sebesar 5,12 % berarti kemampuan fiskal Kota Tebing Tinggi masuk kategori kurang. Karena pendapatan diluar PAD sangat besar yaitu rata-rata 94,48 % berasal dari dana perhitungan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4.6 DANA APBD TEBING TINGGI KEPADA UMMAT ISLAM

Selama era otonomi daerah cukup banyak dinas dinas SKPD yang membut anggaran di APBD untuk memberikan anggaran bantuan kepada masyarakat setiap tahun. Selama ini bantuan-bantuan tersebut dapat di baca di buku didalam buku realisasi perhitungan dinas-dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membuat anggaran untuk dikururkan ke masyarakat antara lain : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat(PMK), Perindagkom dan dinas Sosial. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada table dibawah ini :

PENERIMA BANTUAN USAHA MIKRO KECIL (UMKM) DARI PERINDAGKOM
TEBING TINGGI THN 2005

NO	TAHUN	JUMLAH	Agm Islam	Non Islam	Jlh Dana
1	2005	235	206	29	966.500.000
2	2006	176	166	10	1.057.000.000
3	2007	124	186	30	1.165.500.000
4	2008	147	132	15	1.480.400.000
5	2009	101	79	22	857.000.000
Total		703	769	114	6.426.666.666

Sumber data : Dinas Perindagkom Tebing Tinggi

Dari jumlah 13000 jiwa penduduk miskin di kota Tebing Tinggi setiap tahun mendapatkan bantuan Raskin (beras miskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat. Di Tebing Tinggi mereka bantuan KTP gratis, berobat gratis dengan jamkesda sekaligus mendapatkan bea siswa pendidikan. Dan rumahya dibantu Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) dengan memberi rehab Aladin (Atap Lantai Dinding). Dan sampai saat ini sudah 799 rumah yang di bantu sehingga mereka nyaman tinggal di rumahnya. Yang sebelumnya rumah mereka tidak layak huni. Dari data yang kita himpun dari dinas PMK ternyata dari tahun 2005 – 2009 lebih dari 75 % pertahun bantuan Aladin diberikan kepada umat. Seperti Tabel di bawah ini :

PENERIMA BANTUAN RUMAH/ATAP, LANTAI DAN DINDING (ALADIN)
DARI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PMK) KOTA
TEBING TINGGI 2005 – 2009

NO	TAHUN	JLH PENERIMA	AGM ISLAM	NON ISLAM	JLH DANA
1	2005	260	200	60	1.533.946.100
2	2006	228	181	47	1.469.348.100
3	2007	213	158	55	1.550.288.300
4	2008	159	109	50	1.200.000.000
5	2009	19	17	2	140.008.000
TOTAL					5.993.590.000

Sumber : Dinas PMK Kota Tebing Tinggi

Data lain yang menguatkan penelitian ini tentang peranan APBD di era otonomi daerah Tahun 2005 – 2009 dimana penyerapannya cukup dirasakan ummat Islam. Bisa dilihat pada table di bawah ini :

PENERIMA BANTUAN BEA SISWA BERPRESTASI UNTUK
SD/MI/MTS/SMP/MA/SMA/SMK DINAS PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JLH PENERIMA	AGM ISLAM	NON ISLAM	JLH DANA
1	2005	455	410	55	81.500.000
2	2006	488	388	110	810.300.000
3	2007	176	120	56	972.300.000
4	2008	135	900	45	852.500.000
5	2009	2646	2000	646	1.529.550.000
TOTAL					4.236.150.000

Sumber : Dinas Pendidikan

Dan ada beberapa dinas lainnya yang anggarannya diperuntukkan ke masyarakat seperti dinas kesehatan dengan memberikan jamkesda (jaminan kesehatan daerah) untuk masyarakat. Begitu juga yang melalui jalur pemerintah pusat namanya jamkesmas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah dimasa otonomi daerah mulai tahun 2001 -2009 sangat bermanfaat kepada masyarakat di daerah-daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Khususnya untuk Kota Tebing Tinggi pengalokasian dana APBD yang ada berdampak positif terhadap kebutuhan ummat Islam dimasa Otonomi Daerah. Karena cukup banyak pos-pos anggaran yang ada di APBD mengalokasikan kebutuhan ummat Islam. Seperti pos Pendidikan, Kesehatan, UKM, PMK dan Sosial.
2. Dari hasil analisis juga menunjukkan bahwa daya serap APBD Kota Tebing Tinggi selama otonomi daerah berlangsung cukup mengarah kepada potensi-potensi ummat Islam. Seperti pedagang kecil dan menengah mendapatkan bantuan modal sekaligus pembinaannya. Untuk masyarakat miskin (pra sejahtera) mendapatkan biaya bantuan pendidikan dan ada yang mendapat bantuan rehab rumah Aladin (Atap, Lantai dan Dinding). Disisi lain juga mendapatkan bantuan kesehatan melalui program jaskesda (Jaminan kesehatan daerah), ada juga yang jamkesmas (Jaminan kesehatan untuk masyarakat dari Pemerintah Pusat). Sekaligus juga mendapatkan KTP/KK gratis. Sehingga secara positif berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ummat Islam di Tebing Tinggi.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Disebabkan belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan Kota Tebing Tinggi dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah.
2. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Pemerintah Daerah khususnya Kota Tebing Tinggi perlu diberi keleluasaan dalam melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. Mekanisme pinjaman harus didukung oleh kelembagaan yang berbasis aspirasi masyarakat. Dukungan kelembagaan sebaiknya diikuti oleh Cost Recovery dari BUMD yang profitable sehingga dapat tercipta mekanisme keuangan Kota Tebing Tinggi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Daerah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001
2. Haw Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Cet.2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
3. Kepres No.42 Tahun 2002, Pedoman Pelaksanaan APBN, Bandung : Fokus Media.
4. M Kuncoro, Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang, Jakarta : Erlangga, 2004
5. Pengantar Nota Keuangan Dan APBN, 2009
6. Permendagri Nomor 59 2007 (Penyempurnaan Permendagri No.13 Tahun 2006), Dirjen Depdagri Tahun 2007.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2010

8. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003, Keuangan Negara, Jakarta : Panca Usaha, 2003
9. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Bandung : Fokus Media, 2004
10. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah, Bandung : Citra Utama, 2004
11. Undang Undang No.22 tahun 1999, Pemerintah Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, 1999
12. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Citra Umbara : Bandung, 2004
13. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tebing Tinggi dari tahun 2006 – 2010
14. Realisasi Perhitungan APBD Kota Tebing Tinggi dari Tahun 2001 – 2009
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2007 – 2010